

PENDEKATAN POST KOLONIAL DALAM MELIHAT SEJARAH KOLONIALISME DI KALIMANTAN

Nugroho Nur Susanto*)

Abstract

History exist since it is presented rather than appeared of its own accord; the position of history is essential since deals with events taken place in the past and in the future. Actually, today one may alter the past by altering the way of thinking and how the past is interpreted. It is sensible not to be satisfied by interpretation; moreover it has been presented based on the 'power' during colonialism in Kalimantan. Such 'power' will interpret an event according its own point of view. The 'post-colonial' approach is a vital tool to signify the past of Kalimantan. This approach stresses on ethnological-direct-interpretation supported by material approach such as by archaeology.

A. Pendahuluan

Jasa dan sumbangan dari ilmuwan Barat khususnya Inggris dan Belanda tak diragukan lagi dalam menguak misteri alam dan budaya di berbagai daerah di Nusantara. Perhatian dan minat itu begitu luas, baik dalam memahami alam lingkungan yaitu aspek flora dan faunanya, maupun lingkungan sosial-budaya yang sangat beragam itu. Demikian pula perhatian dan minat terhadap Pulau Kalimantan yang eksotik itu. Peneliti-peneliti asing begitu tekun, gigih, dan telaten berusaha mengamati, memahami, yang kemudian berusaha mengklasifikasi dan mengkategorisasikan, serta berusaha menjelaskan terhadap fenomena yang mereka jumpai.

Namun demikian kehadiran kaum imperialis Barat khususnya Belanda, era kolonialisme tidak hanya terdiri atas ilmuwan-ilmuwan, para pembuat peta, petualang pelayaran dan rohaniawan, melainkan disertai pula para pedagang, pengadu nasib atau pemodal besar yang dijaga oleh tentara-tentara yang terampil

di medan perang, dan para serdadu bayaran yang pandai dalam siasat bertempur. Mengenai hal tersebut, terkait dengan pengetahuan dan tafsir masa lampau yaitu: masa pra penjajahan Belanda dan masa penjajahan menjadi perhatian pada tulisan ini. Demikian pula tentang maksud kedatangan mereka di Pulau Kalimantan, dengan segenap apa yang telah dikerjakan maupun yang telah ditinggalkan selama periode kolonialisme. Baik berupa peninggalan monumental, lanskap, dokumen-dokumen sejarah maupun analisis-analisis sosial-budaya tentang Kalimantan. Kehadiran mereka sebagai kaum imperialis atau kolonialis menorehkan lembaran sejarah hitam bagi penghisapan potensi alam pulau terbesar di Nusantara, perluantisipasi bagi perkembangan sosial-budaya menuju langkah ke depan.

B. Kerangka Pikir

Dalam judul diatas kami mengusung istilah post kolonial terkait dengan usaha "melihat dengan kaca mata lain" tentang

sejarah Pulau Kalimantan masa kolonial. Istilah pasca kolonial pada saat ini terus diperdebatkan, baik dari yang skeptis, yang seakan-akan melihat "genre" ini telah keluar dari kaidah ilmu pengetahuan yang berbeda dengan pengetahuan yang selama ini dianut. Maupun bagi segelintir orang yang memandangnya sebagai "dewa penolong" di saat pengetahuan selalu dicurigai sebagai perpanjangan-tangan dari kekuasaan/kolonisasi. Sedang kata kolonialisme mungkin terasa asing, dikarenakan abad kolonialisme dianggap telah berlalu, dan karena anak keturunan rakyat yang dahulu dijajah itu kini hidup dimana-mana dan telah "menjadi negaranya merdeka". Dengan kaca mata ini, maka seluruh dunia adalah pascakolonial. Prefiks pasca, menyulitkan permasalahan karena kata itu membawa arti "kejadian setelah" dalam pengertian waktu yaitu datang setelah. Dan arti kedua, mempunyai arti ideologis, dalam arti menggantikan dari era pemikiran sebelumnya (Loomba, 2000).

Implikasi istilah ini banyak mendapat kritik, apabila ketimpangan-ketimpangan dan dominasi dari pihak negara kolonial belum bisa diakhiri, maka mengatakan bahwa kolonialisme sudah berakhir adalah prematur. Sebuah negara pada saat yang bersamaan bisa saja sebagai memasuki pascakolonial, karena dalam arti formal telah merdeka, namun dari segi ekonomis dan kultural tetap tergantung pada negara lain/penjajah atau neokolonial (kolonial bentuk baru). Tata global hubungan antar negara tidak tergantung pada pemerintahan langsung, namun ketimpangan dan dominasi bisa muncul dari terjadinya penetrasi dibidang ekonomi, kultural dan politis terhadap sebagian

negara terhadap negara lain.

Pada sisi lain, pendekatan Post Kolonial dapat dipandang sebagai anak kandung era posmo pada saat ini, khususnya menyikapi terhadap ilmu-ilmu budaya, yang berbeda dengan ilmu alam. Kemunculan dan cara pandang pemikiran ini tidak lepas dari ide-ide awal seperti Foucault, Edward W. Said yang dikembangkan oleh pemikir-pemikir yang lebih kemudian seperti Homi Bhabha, Ashis Nandy, maupun Ania Loomba. Tidak ketinggalan pemikir Ahmad Baso, yang menyoroti ide past kolonial dengan pergesekan dengan agama. Mereka berkeyakinan bahwa tentang tafsir masa lalu (sejarah) itu "dihadirkan" untuk menciptakan masa kini dan masa depan. Sebagaimana digambarkan bahwa tanah jajahan identik dengan manusia barbar, manusia berburu manusia, suku primitif, belum mengenal pakaian dan penyembah patung, maupun penindasan atas kaum wanitanya. Sehingga masa lalu (dihadirkan) untuk memenuhi masa kini (saat itu) ketika terjadi kolonialisasi. Sehingga menjadi "sah" kebutuhan menundukkan dan menjajah penduduk pribumi, sehingga pemerintah kolonial pada tahun 1894 mengeluarkan "Tumbang Anoi Agreement" yang melarang pengayauan. Hal ini berbeda dengan kebutuhan "menghadirkan" masa lalu versi kalangan Nasionalisme sebelum kemerdekaan dimana masa lalu dihadirkan sebagai masa kejayaan, masa keemasan dan keagungan.

Hal-hal lain yang cukup strategis adalah tentang klaim-klaim kebenaran, dimana Kebenaran (K besar) atau tentang eksistensi suatu hal sebenarnya tidak dimiliki oleh satu pemikiran atau metode.

Permasalahan kebenaran bukan pada esensi tetapi dari metode yang dipakai. Berpikir alternatif dan toleran terhadap pendapat maupun jenis tafsir yang lain diakui sebagai salah satu cara untuk "memahami" sesuatu. Jadi berpikir secara Pasca Kolonialisme bukanlah sekedar mengoreksi, tetapi bernalar sederhana, berpikir alternatif tentang kemungkinan intelektual dan politis atas perkembangan keadaan dimasa lalu terkait dengan situasi akhir-akhir ini.

Kasus kolonialisme di Indonesia, khususnya di Kalimantan merupakan contoh yang menarik berkaitan dengan cara pandang pemikiran Post kolonial, terkait dengan peran ilmu arkeologi. Hal yang perlu digarisbawahi adalah berusaha bersikap obyektif dalam arti memahami adanya pemikiran intersubjektif dari yang saling beragam itu. Artinya suatu kejadian akan "obyektif" apabila menyertakan pemikiran-pemikiran dari berbagai arah, memang harus diakui dalam menyusun sejarah (tidak?) selalu terkait dengan dokumen, naskah resmi maupun yang telah diketahui umum tetapi kehadiran cerita yang dipercaya oleh masyarakat kebanyakan dan peninggalan bukti-bukti material suatu aktivitas mempunyai peran yang penting dalam mengungkap peristiwa, kejadian maupun sejarah masa lalu.

Pertanyaan-pertanyaan permasalahan sejarah masa lalu masa kolonialisme, khususnya di Kalimantan tak terbatas. Setiap kali memperoleh satu jawaban, justru menimbulkan permasalahan dan pertanyaan baru. Dalam keingintahuan tentang masa lalu itu salah satunya dibidangi oleh ilmu sejarah dan arkeologi. Pada masa penjajahan Belanda,

sumbangan terkait tentang dokumen dan analisis sejarah masa lalu Kalimantan mendapat perhatian yang cukup tinggi. Sebagaimana kajian post Kolonial telah mencapai asumsi bahwa pengetahuan yang dihasilkan kaum imperialis "harus dicurigai" bahwa masa lalu (sejarah) yang diantaranya tentang cerita-cerita atau narasi yang disimpulkan oleh kekuatan-kekuatan imperialis yang terkait keinginan dan kepentingan. Dengan bahasa lain, ada kepentingan untuk mengetahui dan menamai, dan karena mengetahui berkehendak menguasai atasnya. Sejalan dengan ucapan Nietzsche, *the will to know, the will to power*).

C. Kedudukan Arkeologi

Ilmu arkeologi terkait langsung dalam penyusunan sejarah manusia masa lalu (termasuk era kolonialisme) dalam paradigma positivisme, sebagaimana di kemukakan oleh Binford memiliki tiga tujuan ilmu arkeologi: (1) mengetahui cara hidup (2) memahami perubahan budaya, dan (3) memahami proses perubahan kebudayaan. Dalam mencapai tujuan tersebut dalam membentuk analisisnya ini mendasarkan pada sisa-sisa tinggalan materialnya dalam hal ini meliputi: artefak, ekofak, dan feature. Cara berpikir ini tetap diperlukan dalam penyusunan atas sejarah, namun demikian cara berpikir "mutakhir" sebagaimana kecenderungan era pasca dihadirkan untuk mendapatkan gambaran tentang batas-batas klaim kebenaran.

Shanks and Hodder, berpandangan Arkeologi lebih mendekati pada naratif, cerita-cerita suatu saat (*a temporal sequence*), kisah sebab-akibat, sedang fungsinya sebagai agen media berfikir

yang menceritakan sesuatu. Dan *point of view* nya memberikan sumbangsuhnya sebagai pedoman (Shanks and Hodder, 1997; 25).

Disisi lain, semakin diakui bahwa Arkeologi merupakan pemasok pengetahuan yang penting bagi kehidupan dunia masyarakat kontemporer, yang memandang informasi sebagai produk, dimana dari jenis pengetahuan ini mengusung pengetahuan tentang kisah cerita masa lalu dan melengkapinya dalam kesaksian peristiwa sejarah berupa artefak ataupun monumen. Tetapi lebih dari itu benda-benda arkeologi juga diakui lebih mengacu dan berhubungan erat dengan lokalitas dan identitas suatu bangsa. Belakangan data arkeologi digunakan untuk kepentingan komersial dalam dunia *intertainment* (hiburan) dan dunia industri. (Hodder, 1995).

Pada aspek yang lain dari penelitian arkeologi terungkap bahwa apa yang diucapkan atau diumumkan kadang lebih sering berbeda dengan apa yang diperbuat, misalnya penelitian yang dilakukan oleh Bill Rahtje mengenai deposit sampah terkait dengan aktivitas sehari-hari manusia. Ia dan kawan-kawannya mengungkap bahwa konsumsi bir (minuman beralkohol) yang dikonsumsi ternyata melebihi dari apa yang telah dilaporkan secara resmi. Hal ini menunjukkan studi kebudayaan materi yang dimaksudkan untuk menjelajahi berbagai hal yang saling bertentangan dan berbeda serta terkait dengan berbagai interpretasi menjadi penting dalam penelitian kualitatif. Banyak pengalaman yang tersembunyi dari bahasa, khususnya pengalaman yang bersifat subordinat (Magetsari, 2001).

Analisis terhadap sisa-sisa hal-hal artefaktual yang kadang-kadang cuma dilihat sebelah mata tidaklah merupakan upaya yang menyesatkan. Kegunaan analisis-analisis yang demikian akan dapat lebih dirasakan melalui kenyataan bahwa kebudayaan materi bukanlah sekedar produk sampingan dari kehidupan sehari-hari, tetapi sebaliknya lebih dari itu kebudayaan materi adalah produk yang aktif (Hodder, Vide Magetsari, 2001). Lebih lanjut Magetsari menambahkan bahwa analisis kebudayaan materi diperlukan guna mengungkap teori sosial, kajian yang memadai terhadap interaksi sosial menjadi sangat tergantung pada usaha penggabungan-penggabungan dari bukti-bukti benda-benda yang tak dapat bicara tersebut. Lebih lanjut data-data masa lalu dunia arkeologi kemudian dikutip dipungut dan ditafsirkan dalam beberapa bidang budaya yang beragam. Arkeolog pun juga melanjutkannya dengan berbagai hal langkah-langkah, prosedur, pertanyaan-pertanyaan dan kepentingan penghargaan atas materi masa lampau tersebut.

Perlu disadari benda-benda budaya disini, memiliki kedudukan yang unik. Apabila menilik bahan atau subyek yang diteliti secara keseluruhan yang dipelajari terkait dengan arkeologi, sejarah dan antropologi yang mengingatkan manusia sebagai makhluk sosial dalam kegiatan menghasilkan, dan pemakai sesuatu dalam lingkup struktur-struktur sosialnya. Tujuan yang hendak dicapai ilmu arkeologi yang mana dapat dimasukkan kedalam ilmu kemanusiaan (*software*). Sedang menyangkut obyek media yang dipelajari menyangkut data sisa-sisa material kehidupan manusia yang ditinggalkan, lebih mendekati obyek ilmu alam

(hardware). Tetapi hal yang tak terelakkan bahwa bukti-bukti itu dalam kondisi yang sudah rusak dan jumlah yang sangat terbatas. Binford mengumpamakan, seperti halnya rumah yang telah runtuh, yang kemudian diatas reruntuhan itu dibangunlah sebuah jalan. Yang kita temukan itu adalah keadaan saat ini, situasi saat ini dan kondisi yang telah banyak mengalami perubahan, tanpa bisa kembali ke masa lalu.

Kendati saat ini kekhasan ilmu kemanusiaan sudah semakin disadari, berdasarkan langkah-langkah pengamatan, penelitian serta percobaan empiris ilmu-ilmu kemanusiaan berusaha mengembangkan hipotesa, hukum dan teori ilmiah menurut irama mirip dengan irama ilmu alam. Ciri yang mencolok dan esensial yang membedakan dengan ilmu alam adalah kedudukan obyek dan subyek ilmu pengetahuan. Ciri ilmu kemanusiaan lainnya adalah kedudukan dan sifat obyek penelitian. Obyek penelitian, manusia; bukan sebagai benda jasmani saja, tetapi manusia sebagai keseluruhan. Sementara itu manusia (pengamat) sebagai subyek juga memiliki 2 arah: (1) secara hakiki manusia melampaui status objek benda-benda di sekitarnya. (2) si penyelidik sebagai subjek berada ada taraf yang sama dengan obyeknya (Verhaak: 1991). Kekhasan obyek penyelidikan ini lebih nyata jika kita mempertanyakan dua unsur yang sangat esensial yaitu ruang dan waktu. Menurut Imanuel Kant ruang dan

waktu merupakan dua ciri dasar dari material yang dihuni manusia¹.

Sebuah contoh hubungan subyek dan obyek dalam ilmu pengetahuan sosial tampaknya sangat disadari oleh Edward W. Said, seorang yang mengoreksi obyektivitas kaum orientalisme. Meminjam pemikiran Edward W Said atas kritiknya menyangkut penulisan-penulisan sejarah diluar Barat misalnya tentang Orientalisme bahwa sejak kelahirannya tidak semata-mata didorong oleh semangat dan hasrat ilmiah murni yang berbasis epistemologi yang kokoh, namun juga didorong dan dilindungi oleh kolonialisme-imperialisme Barat. Demikian dengan penulisan sejarah tentang masa lalu kehadiran Barat (Belanda) dalam mengeksploitasi dan menguasai kekayaan dan "manusianya" di Kalimantan. Melalui peninggalan masa lalu dan sisa-sisa toponimi dengan penafsiran tentang peninggalan kota yang dibangun pada waktu itu terkait dengan aktivitas, kondisi ruang sosial dan situasi politik terselubung yang dilakukan oleh kaum imperialisme di Sanga-Sanga sebagai daerah tambang minyak bumi dan kota Telukbayur sebagai kota bentukan Belanda dalam mendukung eksploitasi batubara saat itu. Pemikiran Foucault paling tidak mewarnai pandangan di atas, sebagai salah satu aliran posmo dimana ia memberi kontribusi terhadap teori sosial dan kebudayaan dengan menggeser fokus dari teori-teori besar dan analisis kelas ekonomi kepada hal-hal kecil

1) Kedua unsur ini kelihatan tampak nyata bagi manusia, Tetapi dalam rangka hidup manusia, ruang dan waktu sebagai "ukuran" semata-mata tidaklah memadai dan tidaklah sepadan dengan pengalaman manusia itu sendiri. Pengetahuan manusia pun ditandai oleh kedua unsur itu, segala pengamatan dan pengalaman berlangsung di suatu tempat dan pada suatu saat. Ruang dan waktu pada dasarnya bersifat univok, sedangkan sosialitas dan *histories* bersifat analog sedalam hidup manusia itu sendiri. Dalam ilmu kemanusiaan berlaku cara pakir analog bahwa setiap lingkungan masyarakat "sama" atau mirip namun dalam kesamaannya itu juga berbeda, demikian juga setiap peristiwa *histories* "sama" atau mirip satu dengan lainnya, namun juga berbeda dan unik.

yang terabaikan, terutama terkait dengan kuasa pengetahuan.

Banyak penulis abad ke-19 dan abad ke-20 menyamakan kemajuan kolonialisme Bangsa Eropa atas bangsa Timur, sebagai kemenangan sains dan akal atas kekuatan-kekuatan takhyul dan memang banyak rakyat jajahan yang terseliputi hal demikian. Jadi dengan kata lain disepanjang spektrum kolonial, teknologi, dan pengetahuan Eropa dianggap progresif.

Kekhasan ilmu arkeologi sebagaimana juga dirasakan oleh ilmu sejarah adalah menyangkut masa lalu manusia, yang ingin diketahui, diungkap dan dimengerti oleh manusia itu sendiri. Sedang bahan sumber yang digunakan untuk kepentingan itu amatlah terbatas. Maka mau tidak mau terasalah kesenjangan antara kesaksian atau sumber bahan yang tersedia dengan peristiwa atau pribadi yang ingin diketahui. Untuk ilmu sejarah, peristiwa yang belum lama terjadi dapat didapat dengan wawancara, bagaimana dengan peristiwa yang sudah sangat lama? Arkeologi mengandalkan dengan kesaksian-kesaksian material yang tersedia untuk menerangkan peristiwa dimasa lampau tersebut. Kesaksian material ini pun punya banyak lubang, selain dalam arti selektif juga banyak yang hilang, karena berbagai sebab, baik disengaja maupun tidak disengaja.

D. Imperialisme di Kalimantan dan Tinjauannya

Pada tahun 1596 Bangsa Belanda mulai menginjakkan kakinya di bumi Kalimantan diawali di Banjarmasin. Ekspedisi pertama ini dipimpin oleh

Houtman. Kedatangan kedua, terjadi pada tanggal 14 Februari tahun 1606 dibawah pimpinan Gillis Michielszoon yang bermaksud mengadakan hubungan dagang, tetapi ketika rombongan ini menginjakkan daratan semuanya dibunuh oleh pasukan kerajaan Banjar, sebagai wujud rasa curiga terhadap Bangsa Barat. Pada tahun itu pula Kompeni membalas perlakuan penyerangan itu, dengan mengirimkan pasukannya ke Banjarmasin. Kota ini mengalami ketidakamanan dan ancaman maka dipindahkan pusat kota ke daerah Kayu Tangi (Ideham, 2003).

Antara tahun 1607-1609 usaha menjalin hubungan dagang oleh Bangsa Belanda terus dilakukan, sebagai usaha mendekati maksud dan tujuan yang sebenarnya yaitu "menguasai". Kongsi-kongsi dagang Belanda pun berhasil ditancapkan, perkembangan dan kemajuan kongsi perdagangan Belanda tampaknya berkembang kearah monopoli, sehingga di tahun 1630 kemarahan rakyat tak dapat dibendung. Pembakaran dan pengrusakan kantor-kantor Belanda di Banjarmasin merajalela oleh rakyat. Berita ini membuahkan kemarahan di pihak Belanda. Baru pada tahun 1634 Kompeni Belanda mengirim armadanya yang dibawah pimpinan Gijsbert van Londensteijn, Antonie scop dan Steven Barentsz untuk memusnahkan segala kapal asing yang berada di pelabuhan dan sekitarnya. Pada tahun berikutnya 1635 ditandatangani perjanjian yang mengarah pada monopoli perdagangan antara Sultan dengan pihak Kompeni Belanda. Tahun 1636 kantor Dagang Kompeni Belanda dibangun di Banjarmasin dibawah pimpinan Wollebrant Gelijnsen.

Tahun 1638 Kompeni Belanda mulai menunjukkan kekuasaannya, yaitu dengan mengontrol produk lada rakyat, yang tidak segan-segan melakukan pembakaran. Hal ini menimbulkan kemarahan rakyat, sehingga kantor-kantor milik Kompeni Belanda dibakar. Berita ini sampai pula ke Pemerintahan Hindia Belanda di Jakarta, walaupun tidak sampai terjadi serangan besar-besaran, namun aksi teror terus dilakukan terhadap para tukang perahu Banjar oleh orang Kompeni Belanda.

Kompeni Belanda, atau VOC tampaknya di tahun 1660 sangat berkeinginan menjalin perdagangan dengan Banjarmasin. hal ini direalisasikan dengan pengiriman 2 buah kapal dibawah pimpinan Dirck Van Lier ke Banjarmasin untuk mengadakan perjanjian. Isi perjanjian ini diantaranya, menyepakati bahwa Belanda tidak akan mendirikan kantor diwilayah ini. Memang dasar berkeinginan kuat, rupanya perjanjian ini pun ingin diperbaharui di tahun 1663 yang disampaikan oleh Anthony Hurdt dengan isi memungkinkan adanya kantor Belanda yang permanen, namun gagal. Penolakan ini mungkin sebagai langkah antisipasi, menghindari monopoli apalagi imperialisme secara lebih konkrit.

Kehadiran mereka tidak lepas dari perubahan jaman, khususnya yang akibatkan munculnya abad pencerahan yang pada perkembangannya menimbulkan kegairahan dunia pelayaran dalam menemukan daerah-daerah baru, terkait dengan diperkenalkan alat kompas, dan yang terpenting adalah revolusi industri, penemuan mesin uap yang mana memerlukan bahan-bahan baku, maupun kebutuhan bahan bakar. Pada kali pertama

kedatangan Bangsa Barat dalam wujud Imperialisme Belanda di Pulau Kalimantan pertama didorong atas permintaan komoditas lada yang telah terjadi semenjak tahun 1678, dimana perjalanan ini dirintis oleh J. Van Michelen dan P. der Vesten di Kerajaan Banjar pada waktu itu. Sedang untuk pertama kali Kolonialis Belanda mengeksploitasi kekayaan perut bumi berupa bahan tambang batubara, dengan semula menyewa tanah di Pengaron pada tahun 1849 (Ideham: 2003). Perusahaan batubara Belanda ini mulai mengeksploitasi kekayaan perut bumi "emas hitam" pada tahun 1903 hingga tahun 1912 di Pulau Laut. Selain di Kalimantan Selatan, imperialis Belanda mulai mendekati penguasa-penguasa kerajaan di wilayah Kalimantan Tengah dan Kalimantan Timur.

Di Kalimantan Timur, Belanda ikut campur dalam kemelut di Kerajaan Berau, yang kemudian pecah menjadi dua Kerajaan kecil Sambaliung dan Gunungtabur di tahun 1810. Sedang Kerajaan Kutai Kertanegara tidak luput pula mengalami intervensi yang sangat hebat. Penjajahan dan penguasaan yang berkedok "kerjasama" juga dilakukan terhadap kerajaan-kerajaan yang lebih kecil misalnya: Sambaliung, Gunungtabur maupun kerajaan Bulungan di wilayah Kalimantan Timur. Kerjasama yang pada mulanya bermaksud untuk saling menguntungkan, tetapi pada perkembangannya Belanda lebih mendominasi, menguasai, dan menjajahnya. Hal ini tidak lepas dari watak imperialis itu sendiri, yang ingin menghisap kekayaan bumi Kalimantan sebesar-besarnya.

2. Latar Belakang Kemunculan Kota Bentukan

Terkait dengan masa imperialisme yang dihubungkan dengan kehidupan kota atau situasi tatakota maka sesuai dengan apa yang dituturkan oleh Limblad, pada tahun 1986 dalam bukunya *Dayak and Dutch* bahwa ada 3 kota yang dirancang, dibentuk dan dikelola oleh perusahaan-perusahaan Belanda yaitu: Kota Tarakan, Telukbayur dan Sanga-Sanga. Tatakota Tarakan dan Sanga-Sanga terkait eksploitasi bahan tambang minyak bumi, sedang Kota Telukbayur terkait dengan eksploitasi bahan tambang batubara.

Ada dua contoh tentang kemunculan kota, di Kalimantan:

Contoh pertama kemunculan kota Telukbayur. Keberadaan Kota Teluk bayur tidak terpisahkan dengan daya tarik kekayaan alamnya yang berupa bahan tambang batubara. Sebenarnya awal eksploitasi pertambangan telah dimulai sekitar tahun 1910 yang dikelola oleh pengusaha pribumi di Perapatan. Entah dengan penanaman saham atau cara tipu muslihat di tahun 1912 penguasa Belanda melalui perusahaan BPM mulai ikut campur tangan dan mengeksploitasinya. Campur tangan Belanda tidak hanya sampai disini mereka pun sekaligus mempersiapkan permukiman di Telukbayur, sebagai upaya pengeksplotasian batubara secara besar-besaran yang selanjutnya menjadikan permukiman Telukbayur bukan sekedar tempat pekerja, tetapi dapat dikategorikan sebagai sebuah kota pada masa itu. Perusahaan Belanda yang berhasil menanamkan kekuasaan ini disebut dengan SMP (*Stenkollen Mascapic Perapatan*).

Contoh kedua kemunculan kota Sanga-Sanga. Sejarah awal Kota Sanga-Sanga dimulai ketika perjanjian antara Belanda dan Kerajaan Kutai ditandatangani. Moment perjanjian ini berlangsung tanggal 19 Oktober 1850, dimana perjanjian ini semula dimaksudkan untuk saling menguntungkan untuk mengadakan penelitian dan eksplorasi hutan, laut, dan pertambangan. Sejak saat itu para insinyur, ilmuwan yang ahli dalam bidang kehutanan, kelautan dan pertambangan melakukan penelitian di wilayah Kutai Kertanegara. Di tahun 1891 Ir. H.J Menten bersama tim nya menemukan cadangan minyak di Sanga-Sanga sekaligus telah mengantongi izin Konsesi Lauise (Sanga-Sanga) dan Konsesi Mathilde.

Pada tahun 1889 pertama kali ditemukan sumber minyak bumi dan selanjutnya dilakukan eksploitasi Sumur Matilde yang didahului oleh konsesi antara Sultan Adji Muhamad Sulaiman dengan Bangsa Belanda Ir. J.H. Menten dengan perusahaan *Nederlandsch*. Pada tanggal 20 Pebruari 1897 sumur Matilde menyemburkan minyak untuk pertama kalinya. Pada periode ini juga disebut Periode NIIHM, *Nederlandsch Indische Industrie en Handel Maatschappij*, yang berlangsung tahun 1897 hingga 1905. Selama eksploitasi minyak, paling tidak Sanga-sanga telah melewati beberapa pergantian perusahaan atau pemilik. Yaitu Periode awal, *Nederlandsch Indische Industrie en Handel Maatschappij* 1897-1905, periode kedua *Batavia Petroleum Maatschappij* (BPM) 1905 – 1942 dan periode ketiga Periode Pendudukan Jepang 1942-1945 dan dilanjutkan era Permina/Pertamina yang bekerja sama dengan perusahaan swasta asing.

3. Pandangan Post Kolonialisme

Pembuatan kategorisasi dan klasifikasi atas benda mungkin dapat dibenarkan dalam usaha mempermudah dalam hal pengelompokan. Tetapi klasifikasi dan kategorisasi atas manusia atau segolongan orang, bisa jadi mengandung hal yang bersifat politis, atau membawa pada situasi yang kurang menguntungkan. Misalnya, kategori penduduk Kalimantan yang dalam oposisi binner seakan-akan dihuni oleh komunitas manusia yang saling berhadapan, disebut sebagai suku Dayak dan yang lain suku Melayu. Ini "dapat dicurigai" sebagai situasi yang sengaja diciptakan oleh Belanda untuk menimbulkan suasana konflik identitas, memandang permasalahan hitam-putih. Pertentangan ini pada akhirnya meluas pada ciri-ciri kultur seperti agama, tempat tinggal, mata pencaharian dll. Situasi ini tentu menguntungkan Kaum imperialisme yang tidak menghendaki adanya persatuan antar etnis, yang sengaja diciptakan dalam situasi saling mencurigai, yang kemudian disulut politik adu domba. Contoh konkrit di desa Pakana, di Kecamatan Mempawah Hulu ada sebuah komunitas orang yang secara genealogis termasuk suku Dayak Kanayatn, tetapi karena mereka beragama Islam (karena pengaruh Kerajaan Mempawah) mereka dikategorikan sebagai orang Melayu. Ciri mereka diantaranya tidak memelihara babi. Secara umum penyebutan nama Dayak di Kalimantan juga tidak disukai oleh kalangan mereka sendiri.

Contoh kedua, penggambaran tradisi "mengayau" sebagai suatu yang dilebih-lebihkan. Padahal apabila kita merunut hingga sekarang pembunuhan manusia

terhadap manusia masih kerap dilakukan, dengan tidak kalah sadis, walaupun peradaban masa lalu tersebut sudah lama ditinggalkan, misalnya perang menggunakan peralatan tempur modern. Seolah-olah "tradisi" sebagai penegasan atau sebuah gambaran bahwa Kalimantan merupakan daerah yang berperadaban rendah, sehingga menjadi sah untuk diatur, dibiha "dijajah" untuk menjadikan kebudayaannya lebih beradab. Padahal kalau dicermati mengayau bukanlah pekerjaan rutin yang barbarian, tetapi dalam pelaksanaannya ada aturan-aturan main yang tidak sembarangan. Tengkorak hasil mengayau pun memerlukan "perawatan" adat, sehingga arwahnya bisa hidup tenang. Jadi mengayau bukan sembarang memenggal kepala, sebagaimana dalam situasi perang pun mereka pantang membakar lumbung padi dan melukai anak-anak dan wanita. Tradisi dan gambaran ini didapat dari wawancara mengenai tradisi lama dari suku Kenyah.

Kasus ketiga, penguasa imperialisme tidak segan-segan merancukan silsilah keluarga kerajaan, atau membuat dokumen perjanjian yang belum tentu dipahami oleh penguasa kerajaan-kerajaan, yang menandatangani perjanjian tersebut. Hal ini begitu nyata pada saat pengangkatan Sultan Banjar yang ke-12 / 13 yaitu sebagai pengganti Sultan Abdurrahman. Pemerintah Kolonial Belanda menghendaki Sultan Tamjidillah, yang pusat pemerintahannya di Banjarmasin. Istana kerajaan pun konon telah disediakan oleh Belanda. Ia diangkat karena lebih berhak (lebih tua 5 tahun), sedang sumber Kedatuan yang didasarkan atas wasiat Sultan Adam menghendaki Pangeran Hidayattullah. Sumber Kedatuan

menyebutkan, yang lebih tua bukanlah Tamjidillah tetapi Hidayattullah lebih dewasa 5 tahun, alasan lain karena: lebih dekat dengan rakyat dan bagus perangai dan akhlaknya. Sedangkan pada perjanjian-perjanjian yang ditandatangani antara pihak kerajaan dan Belanda, belum tentu arsip ini juga dimiliki oleh pihak kerajaan. Jadi telah terjadi campur tangan politis terhadap sejarah masa lalu kerajaan yang berbeda dengan versi pemerintah Kolonial. Situasi ini berimbas langsung tentang sejarah Kerajaan maupun kronologi pemegang tampuk pemerintahan.

Unsur kekuasaan kolonialisme dipandang mewarnai pada semua tindakan, corak dan bentuk hubungan sosial, kehidupan masyarakat dan penghidupan di kota-kota yang di bentuk di era yang lebih kemudian. Kekuasaan secara umum sebagai perekat yang mengikat kehidupan sosial atau kekuatan paksa yang menyeluruh mengenai aspek kehidupan memang tak terbantahkan apalagi dibuktikan dengan kasus Kota Telukbayur dan Sanga-Sanga. Tetapi tidak salah pula bahwa kekuasaan kolonialisme atas kedua kota itu, harus dipahami sebagai proses yang menghasilkan dan memungkinkan segala bentuk aksi, hubungan dan pengaturan sosial. Dalam pengertian kekuasaan tidak hanya membelenggu tetapi juga memberi daya dalam corak yang khas, yang tampil untuk kepentingan yang lebih besar bagi keuntungan Bangsa Imperialis itu sendiri, baik jangka pendek maupun jangka panjang.

Situasi kota Telukbayur dan Kota Sanga-Sanga dimasa lalu, nampak bahwa segala aspek kehidupan kota seakan-akan

menggambarkan aktualisasi kehidupan kota-tambang dengan kontrol kekuasaan kaum kolonial yang sangat dominan. Segala aspek dari hal-hal umum seperti tata kota, arus ekonomi, kebijaksanaan sosial politik dan situasi pendukung komunitas seperti budaya dan pendidikan serta situsasi "pabrik" tertanam begitu kuat. Kehidupan kota dan sosial masyarakatnya menggambarkan aktualisasi kekuasaan yang menjunjung tinggi efisiensi dan efektivitas kerja yang tinggi pada perusahaan, tetapi dalam peri kehidupan sangat merugikan bagi rakyat dan penduduk yang terjajah untuk jangka panjang. Kontrol yang ketat diterapkan pada disegenap aspek dan lini kehidupan, baik yang rasional maupun irrasional. Bahkan pada saat terjadi amuk stengkollen, untuk meredam kemarahan warga pihak perusahaan Belanda harus mendatangkan pasukan dari Jakarta.

Menurut para pengkaji post Kolonial, tahap pertama penjajahan dimaksudkan sebagai penguasaan atas kekayaan alam dan sejumlah komoditas penting, hasil bumi ataupun yang ada di perut buminya. Sehingga, penjajahan tahap awal ini disebut pula sebagai penjajahan teritorial. Pada tahap berikutnya, penjajahan dimaksudkan sebagai penguasaan atas orang, gagasan dan pola pikir masyarakatnya. Mereka kaum penjajah lebih jauh ingin mengontrol alam pikiran masyarakat yang dijajah (Homi Bhabha Vide Ahmad Baso, 2005).

E. Penutup

Sebagaimana halnya Indonesia, khususnya dalam pembicaraan Kalimantan tidaklah mungkin mengelak dari warisan kolonialisme. Bukan hanya

pada struktur negara, sistem pemerintahan, sistem kemasyarakatan, dan hukum melainkan juga dalam hal mentalitas, yang mencakup agama, tradisi, dan warisan pengetahuan, (Baso, 2005: 46-48). Lebih lanjut, Kolonialisme meninggalkan bekas, jejak, sisa-sisa dalam sejarah dimana kita menggali pikiran-pikiran lama, misalnya dalam menelaah Hikayat Banjar. Bagaimana seandainya yang disebut autentik atau asli itu sempat dipercik atau dipoles corak kolonialisme tanpa pernah lagi tahu dan peduli dari mana dan lewat mana "arus" ini masuk. Jadi keberadaan kita pun bisa juga disebut sebagai subyek post kolonial.

Pada saat ini sudah tidak mungkin kita ditemui saksi-saksi sejarah, apalagi mengingat kurun waktu berabad-abad. Sedang bukti-bukti tertulis dan dokumen resmi belum tentu dibebaskan secara

transparan. Kalau pun toh ada perlu penelaahan, yang cermat. Hal ini terkait dengan kedudukan subyek sejarah yang tak terelakkan, antara kaum penjajah dan yang dijajah, oposisi binner, yang selalu berhadapan. Data arkeologi berusaha menengahinya. Dengan menampilkan nuansa data lain yang bersifat fisik, material sisa-sisa aktivitas masa lalu itu, tentu memerlukan interpretasi lebih lanjut. Kasus kolonialisme di Indonesia, dalam kasus ini Pulau Kalimantan tergolong unik merupakan sejarah panjang, dengan berhadapan dengan masyarakat pribumi yang beragam maupun kekayaan alam yang melimpah. Kehadiran cara pandang post kolonial merupakan hal yang menarik berkaitan dengan cara berpikir alternatif, yang membangkitkan sikap waspada atas tafsir masa lalu, yang terkait langsung dengan masa kini dan masa depan.

DAFTAR PUSTAKA

- Anonim, 2002 **Monografi Kecamatan Sanga-Sanga, Kabupaten Kutai Kertanegara, Provinsi Kalimantan Timur**, Pemerintah Kecamatan Sanga-Sanga.
- Ahmad Baso, 2005 **Islam Pasca Kolonialisme Perselingkuhan Agama**, Kolonialisme dan Liberalisme. Bandung : Mizan
- Loomba, Ania, 2000. **Kolonilisme/Pasca kolonialisme**. Yogyakarta: Bentang Budaya (Terjemahan)
- C. Verhaak dan R Haryono Imam, 1991. **Filsafat ilmu Per pengetahuan**, Jakarta: Gramedia

- Chris Barker, 1999. **Cultural Studies Teori dan Praktek** .Yogyakarta: Bentang
- D. Adham, 1981, **Salasilah Kutai**, Proyek Penerbitan Buku Sastra Indonesia dan Daerah: Jakarta
- Hartatik, 2005, **Penelitian Etnoarkeologi Religi Suku Dayak Kanayatn di Kabupaten Landak Kalimantan Barat**. Banjarbaru: Balai Arkeologi Banjarmasin.
- Hodder, Ian. 1995. **Interpreting Archaeology**. London and New York: Routledge

- Limdblad, Thomas, J. 1988. **Between Dayak and Dutch**, The Economic History of Southeast Kalimantan, Dordrecht Holand; Foris Publications
- Naniek Harkantiningsih, Dkk (Ed), 1999. **Metode Penelitian Arkeologi**, Jakarta: Pusat Penelitian Arkeologi Nasional.
- Susanto, Nugroho Nur, 2002. **Eksploratif Pantai Timur Kalimantan Kabupaten Berau**, Banjarbaru: Balai Arkeologi Banjarmasin
- , 2004. **Penelitian Pola Keruangan Tatakota Telukbayur Kota Kolonial Di Kabupaten Berau, Kalimantan Timur**. Banjarbaru: Balai Arkeologi Banjarmasin
- , 2005. **Penelitian Pola Keruangan Tatakota Sanga-sanga Kota Kolonial Di Kabupaten Kutai Kertanegara, Kalimantan Timur**. Banjarbaru: Balai Arkeologi Banjarmasin
- Suriansyah Idehan, (Ed) dkk. **Sejarah Banjar**, 2003. Banjarmasin: Pemda Prov. Kalimantan Selatan
- Syaukani, H.R. **Palagan Merah Putih Sanga-Sanga**, 27 Januari 1947. 2003 Tenggara: Balitbangda Kutai Kertanegara
- *) Penulis adalah Peneliti Muda pada Balai Arkeologi Banjarmasin